

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN  
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN  
VARIABEL PEMODERASI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN  
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK**  
(Studi Kasus pada DPRD Se Eks Karesidenan Surakarta)



**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**WENDY ROSSEL SUNDARI**

**B 200 100 261**

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca Naskah Publikasi dengan judul:

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP  
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL PEMODERASI  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK  
(Studi Empiris pada DPRD Se Eks Karesidenan Surakarta).**

Yang ditulis oleh:

**WENDY ROSSEL SUNDARI**

**B 200 100 261**

Penandatanganan berpendapat bahwa Naskah Publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Maret 2014

Pembimbing 2

Pembimbing 1



(Eny Kusumawati, S.E.,Ak)

(Banu Witono, S.E.,M.Si.,Ak)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, S.E.,M.Si)

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP  
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL PEMODERASI  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK**  
(Studi Kasus pada DPRD Se Eks Karesidenan Surakarta)

**WENDY ROSSEL SUNDARI**

**B200100261**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: [wendyrochel@yahoo.co.id](mailto:wendyrochel@yahoo.co.id)

**ABSTRAKSI**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran, variabel dependen adalah pengawasan keuangan daerah dan variabel pemoderasinya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Se Eks Karesidenan Surakarta periode 2009-2014, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 57 responden. Diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Pengujian menggunakan uji validitas, uji realibilitas, dan uji asumsi klasik, serta dalam pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara statistik terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan variabel partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara statistik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

**Kata kunci:** *Keuangan Daerah, Pengetahuan Dewan, Pengawasan Dewan, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik.*

**A. PENDAHULUAN**

Pengawasan keuangan daerah merupakan masalah utama bagi setiap daerah untuk menciptakan otonomi daerah. Harapan publik bahwa manajemen

keuangan berjalan dengan baik salah satunya dalam hal bidang pengendalian keuangan. Namun dalam kenyataannya masih ada masalah mengenai daerah penyalahgunaan kontrol keuangan dana lokal dengan berbagai modus. Wilayah dewan pengawasan keuangan dipengaruhi oleh pengetahuan tentang anggaran dan dimoderatori oleh partisipasi publik dan transparansi dalam kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mereplikasi Utami dan Syofyan pada tahun 2013. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu terletak pada daerah penelitian dan teknik pengambilan sampel. Maka peneliti ini mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi empiris pada DPRD Se Ekskaresidenan Surakarta)”.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut pasal 1 ayat (5) PP. No. 58 tahun 2005, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

### **2. Pengawasan**

Menurut Baswir tahun 1997 pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan- aturan dari tujuan yang telah ditetapkan.

### **3. Konsep Anggaran**

Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya diperlukan kebutuhan dan

keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

#### **4. Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran**

Pengetahuan merupakan kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Maka, pengetahuan Anggota Legislatif Daerah yaitu mengetahui tentang anggaran dan kemampuan Dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan, kegagalan atau kebocoran anggaran.

#### **5. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya (Lubis, 2010:238). Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

#### **6. Transparansi Kebijakan Publik**

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan memiliki arti yang sangat penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah.

#### **7. Pengembangan Hipotesis**

Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Apabila pengetahuan dewan tentang anggaran itu baik, maka diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan dewan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

**H1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara statistik terhadap pengawasan keuangan daerah.**

Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai sumber energi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dan advokasi anggaran. Jadi diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkatkan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

**H<sub>2</sub>: Partisipasi masyarakat berpengaruh secara statistik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.**

Bahwa semakin transparan kebijakan publik dalam hal ini adalah APBD, maka dapat meningkatkan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan akan semakin kuat ketika dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik.

**H<sub>3</sub>: Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh secara statistik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.**

## **8. METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan terhadap anggota DPRD Se Eks Karesidenan Surakarta periode 2009-2014. Data dari penelitian ini adalah data primer dari kuesioner serta jenis penelitian yang digunakan adalah studi empiris dan kuisioner pada pihak/instansi terkait guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian.

### **b. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD yang membidangi perekonomian Se Eks Karesidenan Surakarta Periode 2009-2014, yang berjumlah 66 orang anggota. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, metode *purposive sampling* adalah yaitu suatu metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2012: 68), yaitu anggota dewan yang membidangi

perekonomian dan keuangan karena bidang (komisi) inilah yang berkaitan dengan keuangan daerah (APBD).

## **C. Metode Analisis Data**

### **1. Uji Kualitas Data**

#### **a. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Hasil dari uji normalitas adalah sebagai berikut apabila nilai signifikansi dari pengujian *product moment*  $< 0,05$ , maka data valid atau apabila nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dari pengujian *kolmogorof-smirnof*, maka data valid.

#### **b. Reliabilitas**

Sebelum digunakan dalam penelitian untuk mengambil data, terlebih dahulu kuesioner akan diuji reliabilitas. Untuk mengukur reliabilitas dengan uji *statistic cronbach alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha*  $> 0,6$  (Ghozali, 2011: 49).

### **2. Uji Asumsi Klasik**

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011: 58). Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogorof-smirnov* pada  $\alpha$  sebesar 5%.

#### **b. Uji Heterokedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila hasil regresi untuk masing-masing variabel menunjukkan hasil signifikansi di atas tingkat kepercayaan atau signifikansi 5%, maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

### c. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Variabel yang menyebabkan multikolinieritas dapat dilihat dari nilai toleransi yang lebih dari 0,1 dan VIF yang kurang dari 10 (Ghozali: 2011).

## 3. Uji Hipotesis

### a. Analisis Regresi

Setelah data yang terkumpul diuji validitas dan reliabilitas, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Analisis statistik data penelitian menggunakan program *SPSS versi 17 for Windows*.

#### a. Pengujian hipotesis 1

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PDTA} + e \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PDTA} + \beta_2 \text{PM} + \beta_3 \text{PDTA} \times \text{PM} + \dots \dots \dots (2)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PDTA} + \beta_4 \text{TKP} + \beta_5 \text{PDTA} \times \text{TKP} + e \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

Y = Pengawasan Keuangan Daerah

$\alpha$  = Konstanta

PDTA = Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

PM = Partisipasi Masyarakat PDTA, PM = Interaksi antara PDTA dan PM

TKP = Transparansi Kebijakan Publik PDTA,

TKP = Interaksi antara PDTA dan TKP

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien Regresi

$\beta_1 \beta_4 \beta_5$  = Koefisien Regresi

### b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menyatakan proporsi atau prosentase total variabel dependen yang dapat di jelaskan oleh variabel independen. Nilai  $R^2$  dihitung dengan rumus sebagai berikut (Ghozali, 2011: 127). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model



dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara 0 dan 1.

**c. Uji F**

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada pengaruh perbedaan varian antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , artinya *variable independent* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *variable dependent* atau jika probabilitas lebih kecil dari 0,05.

**d. Uji t (t-test)**

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan (Ghozali: 2011).

**D. HASIL PENELITIAN**

**1. Pengujian Kualitas Data**

**a. Uji Validitas**

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

No. Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Sig	Kesimpulan
1	0,673	0,261	0,000	Valid
2	0,613	0,261	0,000	Valid
3	0,766	0,261	0,000	Valid
4	0,669	0,261	0,000	Valid

Pengawasan Keuangan Daerah

No. Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Sig	Kesimpulan
1	0,467	0,261	0,000	Valid
2	0,434	0,261	0,000	Valid
3	0,590	0,261	0,000	Valid
4	0,542	0,261	0,000	Valid

5	0,506	0,261	0,000	Valid
6	0,505	0,261	0,000	Valid
7	0,483	0,261	0,000	Valid
8	0,407	0,261	0,002	Valid
9	0,276	0,261	0,038	Valid
10	0,330	0,261	0,012	Valid
11	0,365	0,261	0,009	Valid
12	0,437	0,261	0,001	Valid

#### Partisipasi Masyarakat

No. Item	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Sig	Kesimpulan
1	0,428	0,261	0,001	Valid
2	0,387	0,261	0,003	Valid
3	0,713	0,261	0,000	Valid
4	0,714	0,261	0,000	Valid
5	0,708	0,261	0,000	Valid
6	0,328	0,261	0,013	Valid
7	0,369	0,261	0,005	Valid

#### Transparansi Kebijakan Publik

No. Item	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Sig	Kesimpulan
1	0,326	0,261	0,013	Valid
2	0,888	0,261	0,000	Valid
3	0,840	0,261	0,000	Valid
4	0,777	0,261	0,000	Valid

5	0,777	0,261	0,000	Valid
---	-------	-------	-------	-------

#### b. Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Critical Value	Keterangan
PDTA	0,612	0,6	Reliabel
PKD	0,657	0,6	Reliabel
PM	0,605	0,6	Reliabel
TKP	0,789	0,6	Reliabel

### 2. Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Model	Kolmogorov-Smirnov	Sig (2-tailed)	Keterangan
<b>1</b>	1,225	0,100	Normal
<b>2</b>	1,027	0,243	Normal
<b>3</b>	1,021	0,248	Normal

### 3. Pengujian Hipotesis

#### Uji Hipotesis Persamaan Pertama

Variabel	Koef. Regresi	t <sub>hitung</sub>	Prob.
Konstanta	48,330		
Pengetahuan Dewan	0,245	2,813	0,008
R <sup>2</sup>	0,184		
Adj. R <sup>2</sup>	0,161		
F hitung	7,916		
Prob. F	0,008		

Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{PKD} = 48,330 + 0,245 (\text{PDTA})$$

#### Uji Hipotesis Persamaan Kedua

Variabel	Koef. Regresi	t <sub>hitung</sub>	Prob.
Konstanta	54,461		

Pengetahuan Dewan	-0,157	-0,275	0,892
Partisipasi Masyarakat	-0,221	-0,703	0,765
Interaksi PDTAPM	0,014	0,997	0,715
R <sup>2</sup>	0,210		
Adj. R <sup>2</sup>	0,138		
F hitung	2,928		
Prob. F	0,048		

Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{PKD} = 54,461 - 0,157(\text{PDTA}) - 0,221\text{PM} + 0,014 \text{PDTAPM}$$

### Uji Hipotesis Persamaan Ketiga

Variabel	Koef. Regresi	t <sub>hitung</sub>	Prob.
Konstanta	43,710		
Pengetahuan Dewan	0,569	1,183	0,245
Transparansi Kebijakan Publik	0,307	0,640	0,527
Interaksi PDTKP	-0,021	-0,819	0,419
R <sup>2</sup>	0,340		
Adj. R <sup>2</sup>	0,280		
F hitung	5,657		
Prob. F	0,003		

Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{PKD} = 43,710 + 0,569 \text{PDTA} + 0,307\text{TKP} - 0,021 \text{PDTATKP}$$

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara statistik terhadap pengawasan keuangan daerah, dikarenakan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,813 > 2,026$ ) pada taraf signifikansi 5% ( $p < 0,05$ ).
2. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan

daerah, dikarenakan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,368 < 2,026$ ) ditolak pada taraf signifikansi 5% ( $p > 0,05$ ).

3. Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara statistik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, Karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0,819 < 2,026$ ) ditolak pada taraf signifikansi 5% ( $p > 0,05$ ).

#### **b. Saran**

Dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian mendatang hendaknya mengembangkan sampel yang lebih diperluas untuk anggota DPRD di seluruh kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
2. Peneliti berikutnya hendaknya menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara ke anggota dewan dan diharapkan anggota dewan dapat merespon pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki.
3. Peneliti berikutnya hendaknya menambah variabel lain, karena masih terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat  $\rho$  keuangan daerah, misalnya pengalaman anggota dewan, pendukung, dukungan pemerintah daerah, dan lain-lain.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baswir, Revrisond. 1997. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFE: Yogyakarta.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks: Gramedia

- Darma, Jufri dan Ali Fikri, H. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Mediasi*, Vol. 4 No.1 Juni 2012.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: BP UNDIP.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mayasari, Rosalina Pebriana. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik Sebagai Variabel Moderating. Universitas Tridinanti Palembang. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)*, Vol. 2, No. 1.
- Novietta, Liza. 2010. Pengaruh partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi terhadap hubungan pengetahuan eksekutif tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah: STIE Harapan Medan, Vol.2, No.1, maret 2010.
- Pangesti Isa. 2013. Analisis pengetahuan dewan tentang pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan menggunakan variabel moderating. *Accounting Analysis Journal AAJ* 1(3) 2013.
- Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi* (Purwokerto).
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah*.
- Sugiyono. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Tahir, Ariffin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Penerbit: PT. Pustaka Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- Utami, Kurnia dan Syofyan, Efrizal. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal WRA* vol.1 No.1.